JMPIS: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
E-ISSN: 2716-375x
P-ISSN: 2716-3758
DINASTI REVIEW
https://dinastirev.org/JMPIS dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di SMPN 8 Percut Sei Tuan

Icha Natasya Aulia[1*], Tengku Darmansah[2]
[1]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, ichanatasya0612@gmail.com
[2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, tengkudarmansah@uinsu.ac.id

[*]Corresponding Author: ichanatasya0612@gmail.com

Abstract: *The Indonesian education system has experienced eleven curriculum changes. Over time, various reasons and rationalizations have caused the curriculum in Indonesia to change over time. This study aims to understand the role of the vice principal in implementing the independent curriculum at SMPN 8 Percut Sei Tuan. This research design uses a case study approach with a descriptive qualitative method. Data were obtained through interviews with the vice principal who is responsible for the curriculum, teachers who teach with the 2013 curriculum approach, and teachers who implement the independent curriculum. The results of the study indicate that the vice principal plays a very important role in implementing the independent curriculum at SMPN 8 Percut Sei Tuan, playing an active role in guidance and supervision. The vice principal in the curriculum field always maintains good communication with the principal. and teachers. The success of implementing the independent curriculum is strongly supported by smooth communication, facilities provided by the school, professional development followed by teachers, and guidance and leadership provided by the school.*

Keywords: *Vice Principal for Curriculum, Independent Curriculum, Curriculum Implementation*

Abstrak: Sistem pendidikan Indonesia telah mengalami sebelas kali pergantian kurikulum. Seiring berjalannya waktu, berbagai alasan dan rasionalisasi menyebabkan kurikulum di Indonesia berubah seiring berjalannya waktu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran wakil kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di SMPN 8 Percut Sei Tuan. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab atas kurikulum, guru yang mengajar dengan pendekatan kurikulum 2013, serta guru yang menerapkan kurikulum merdeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakil kepala sekolah memegang peran yang sangat penting dalam penerapan kurikulum mandiri di SMPN 8 Percut Sei Tuan, berperan aktif dalam bimbingan dan pengawasan. Wakil kepala sekolah di bidang kurikulum selalu menjaga komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. dan guru. Keberhasilan penerapan kurikulum merdeka sangat didukung oleh komunikasi yang lancar,

fasilitas yang disediakan sekolah, pengembangan profesi yang diikuti oleh guru, serta bimbingan dan kepemimpinan yang diberikan sekolah.

Kata Kunci: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kurikulum Merdeka, Implementasi Kurikulum

PENDAHULUAN

Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, yang bertujuan mengubah pola pikir dan tindakan orang atau kelompok agar dapat berkembang dengan pembinaan dan pelatihan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan harus sesuai dengan pengembangan kurikulum yang sedang diterapkan. Kurikulum memegang peranan yang sangat vital dalam menunjang proses pembelajaran di bawah pengawasan serta tanggung jawab lembaga pendidikan dan tenaga pengajarnya guna mencapai sasaran pendidikan (Sri Gusty, 2020).

Hal ini terutama relevan untuk jenjang pendidikan menengah, di mana siswa berada dalam fase transisi yang membutuhkan metode pembelajaran yang tepat. Wakil kepala sekolah, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kurikulum, harus melaksanakan program kurikulum yang telah dirancang bersama kepala sekolah. Penelitian yang serupa di SMK Yogyakarta mengindikasikan bahwa peran wakil kepala sekolah dalam hal kurikulum sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diterapkan dengan baik. Fungsi wakil kepala sekolah dalam kurikulum sangat krusial untuk menjamin bahwa kurikulum yang mandiri dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan tujuannya (Rizki Kurniati, 2024).

Hasil pemantauan pelaksanaan kurikulum merdeka yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat lembaga pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 2023). Berdasarkan informasi yang ada, skor numerasi di sekolah-sekolah di wilayah 3T yang mengadopsi kurikulum merdeka setelah satu tahun mencapai 8,15, dan setelah tiga tahun implementasi meningkat menjadi 12,49. Hasil survei dan evaluasi menunjukkan bahwa 97 persen guru memberikan tanggapan positif terhadap penerapan kurikulum tersebut. Kurikulum merdeka telah diadopsi oleh lebih dari 300 ribu lembaga pendidikan di Indonesia dengan target untuk sepenuhnya diterapkan pada 2028.

Namun, penerapan kurikulum merdeka di tingkat SMP menghadapi sejumlah kendala dalam implementasinya. Beberapa hambatan utama yang muncul adalah: (1) perbedaan pemahaman guru mengenai konsep kurikulum, (2) perlunya inovasi dalam penyesuaian metode pembelajaran, dan (3) sistem penilaian yang berbasis pada capaian kompetensi yang cukup rumit. Dari studi pendahuluan pada SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan, ditemukan meskipun penerapan kurikulum merdeka di sana baru berlangsung sekitar 2 tahun, para guru merasa tidak menghadapi kesulitan yang signifikan. Hal ini disebabkan beberapa prinsip pembelajaran kurikulum merdeka telah diterapkan sebelumnya sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Selain itu, pembelajaran berbasis proyek yang saat ini terdapat dalam kurikulum merdeka sebagai bagian Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tidak dapat dipisahkan dari peran kepala sekolah dan wakil kurikulum dalam memperkuat penerapan kurikulum merdeka. Walaupun demikian, masih sedikit penelitian yang mendalami peran wakil kurikulum terkait penerapan kurikulum merdeka, khususnya di tingkat SMP. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana peran Wakil Kepala

Sekolah Bidang Kurikulum dalam menerapkan Kurikulum Merdeka di SMPN 8 Percut Sei Tuan.

METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus ini dipilih karena memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang konteks, dinamika dan peran wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Metode kualitatif deskriptif dipilih untuk mengeksplorasi solusi berkelanjutan untuk pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran ang memenuhi tuntutan zaman. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memahami pengalaman dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena yang diteliti (Fakhri, 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan, yang berlokasi di Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristiknya yang relevan dengan topik yang diteliti, dan penelitian ini dilakukan pada lingkungan yang alamiah yang diungkapkan dalam bentuk deskripsi. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan observasi dan wawancara oleh wakil kurikulum dan beberapa guru yang menjadi subjek utama. Sumber data sekunder diambil dari berbagai jurnal dan literatur yang terkait.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Beberapa langkah yang dilakukan untuk analisis data, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan. Pendekatan ini diterapkan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan lengkap mengenai peran wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam implementasi kurikulum Merdeka di SMPN 8 Percut Sei Tuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Kepemimpinan sebuah institusi adalah sebuah sistem yang utuh, sebuah unit, yang di dalamnya terdapat sub sistem seperti yayasan, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah (untuk kurikulum, kesiswaan, dan infrastruktur). Kepala sekolah harus mengambil peran sebagai pemimpin. Selain itu, wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga harus mengambil peran sebagai manajer. Wakil kurikulum mengambil peran kepemimpinan sehingga kepala sekolah dapat fokus pada kebutuhan sekolah (DeMatthews, 2014). Pentingnya arti kepemimpinan Q.S. Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi (Kemenag RI, 2017):

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

> *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi mereka berkata Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau Tuhan berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".* (Q.S. 2:30).

Ayat ini menunjukkan bahwa khalifah yang berarti pemimpin, diperintahkan oleh Allah Swt. untuk menjalankan tanggung jawab dan kepemimpinan di dunia. Manusia ditunjuk sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Namun, beberapa malaikat mempertanyakan peran manusia sebagai khalifah di bumi.

Menurut Sari dan Hendrayati, wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum memiliki peran sebagai perencana, pengatur dan pengawas dalam pelaksanaan kurikulum di

tingkat lembaga pendidikan (Sari, D. P., & Hendrayati, 2021). Sedangkan, menurut Permendikbud No. 6 Tahun 2021 yakni: 1) merancang program pembelajaran dan membagi tugas kepada guru, 2) menyelenggarakan pengembangan kurikulum, 3) mengelola kegiatan belajar mengajar, 4) menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, 5) menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran (Permendikbud, 2021).

Proses manajemen kurikulum yang efektif sangat bergantung pada wakil kepala sekolah yang mengelola kurikulum. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel penelitian Razali M. Thaib, manajemen kurikulum merupakan salah satu bentuk manajemen yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan proses pembelajaran, dengan fokus pada peningkatan kualitas interaksi dalam kegiatan belajar mengajar (Fatimatuzzohroq, 2022). Wakil kepala sekolah memainkan empat peran utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu: persiapan kurikulum, desain kurikulum, implementasi kurikulum, dan pengendalian kurikulum.

Gunawan lebih lanjut menjelaskan bahwa wakil kepala sekolah yang mengawasi kurikulum selama fase implementasi kurikulum mandiri harus memiliki kualitas berikut: 1) pemahaman tentang pembelajaran berbasis proyek, 2) kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran, 3) kemampuan untuk menganalisis data untuk pengambilan keputusan, dan 4) kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kebijakan pendidikan. Wakil kurikulum yang dapat memenuhi peran ganda ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan guru (Istiana, 2023).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa guru di SMPN 8 Percut Sei Tuan, dapat disimpulkan bahwa peran wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap kurikulum sangat penting dan memberikan kontribusi yang signifikan. Lebih lanjut, sekolah ini menerapkan dua jenis kurikulum: Kelas 7 menerapkan kurikulum mandiri yang telah berlaku selama hampir dua tahun, sedangkan kelas 8 dan 9 menggunakan kurikulum 2013 (K13). Untuk mengajar secara efektif, guru, khususnya guru mata pelajaran, harus menguasai kedua kurikulum tersebut. Oleh karena itu, peran wakil kepala sekolah dalam manajemen kurikulum sangat penting untuk implementasi kurikulum yang optimal.

Beberapa guru di SMPN 8 Percut Sei Tuan menambahkan bahwa wakil kepala sekolah bidang manajemen kurikulum selalu memberikan pelajaran tentang implementasi kurikulum. Pada setiap sesi pelatihan, wakil kepala sekolah membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada para guru untuk memastikan pengembangan materi pembelajaran yang optimal bagi siswa. Setelah sesi pelatihan yang dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah juga menyelenggarakan sesi pelatihan sendiri di bawah bimbingan wakil kepala sekolah dengan mengundang guru-guru dari sekolah lain yang memiliki kurikulum serupa.

Dukungan dan semangat kepala sekolah dan wakil kurikulum yang senantiasa memberikan dukungan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dirasakan oleh guru sangat membantu dalam terus belajar dan menemukan hal-hal baru, khususnya bagi instruktur mengemudi yang perlu memahami dan membuat P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Selain itu, sarana pendukung seperti proyektor, pengeras suara, dan buku pelajaran memainkan peranan yang sangat penting dalam kelancaran kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum merdeka.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa keberhasilan kepemimpinan ini dilandasi oleh integritas, rasa saling percaya, dan komitmen yang kuat antara wakil kurikulum dengan guru. Wakil kepala kurikulum mampu membangun hubungan interpersonal yang solid sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan program di sekolah.

Kurikulum Merdeka Belajar

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan ketentuan tentang tujuan, isi, pokok bahasan, dan cara yang digunakan sebagai pedoman

dalam menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu." Kerangka hukum ini memberikan landasan bagi lembaga pendidikan untuk merancang dan melaksanakan kurikulum yang relevan terkait falsafah dan tujuan pendidikannya.

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru yang secara resmi diakui sebagai pengembangan dari Kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Kurikulum ini mulai berlaku secara penuh pada tahun 2024 setelah melalui evaluasi terhadap jenjang pendidikan K-13. Kurikulum ini mencakup berbagai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Profil Pelajar Pancasila (Mubarak, 2022).

Hasil observasi yang dilakukan guru SMPN 8 Percut Sei Tuan terhadap P5 (Proyek Penguatan Profil Siswa Pancasila) pada kurikulum mandiri menunjukkan bahwa siswa kelas 7 sangat antusias dan lebih aktif. Hal ini dikarenakan sebagian besar proyek yang dilaksanakan di luar kelas lebih menarik bagi mereka dibandingkan pembelajaran di kelas. Semua siswa dan guru terlibat dalam pelaksanaan P5, bahkan siswa kelas 8 dan 9 yang melihat kegiatan kelas 7 menunjukkan minat, meskipun mereka hanya dapat mengamati dan tidak berpartisipasi secara langsung. Keinginan mereka untuk terlibat dalam proyek dapat terpenuhi jika guru mata pelajaran mengadaptasi bahan ajar dan mengembangkan praktik yang sesuai.

Guru juga mengamati bahwa siswa menjadi lebih proaktif, pembelajaran tidak lagi monoton, dan pelaksanaan proyek mendorong kolaborasi yang lebih erat antara siswa dan guru. Pembelajaran di sekolah dasar dan kurikulum mandiri memiliki kesamaan, karena keduanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahman kepada siswa. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan, yang meliputi pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada K-13, hasil pembelajaran yang diinginkan dari materi tersebut tercapai. Namun dalam kurikulum merdeka, keberhasilan ditentukan oleh bagaimana materi disampaikan kepada siswa dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada pemahamannya (pembelajaran berdiferensiasi), sehingga mereka merasa nyaman dan memahami materi.

Indikator keberhasilan dalam K-13 meliputi nilai, kinerja, dan perilaku siswa, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas dan sikap mereka sehari-hari. Indikator keberhasilan kurikulum merdeka berfokus pada partisipasi siswa yang setara dalam proses pembelajaran, efektivitas pembelajaran, dan memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Meskipun program ini baru berjalan selama dua tahun di SMPN 8 Percut Sei Tuan penerapan kurikulum berhasil 90%, karena kerja sama yang baik antara guru dan dukungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum.

Perbedaan Kurikulum Mereka Dan K13

Dukungan sekolah sangat penting untuk menerapkan kurikulum baru. Transisi dari kurikulum lama ke kurikulum baru bukanlah hal yang mudah bagi guru, mereka memerlukan dukungan yang tepat dari sekolah dan pemerintah. Sebagai bagian dari proses pengembangan kurikulum, sekolah mendorong guru untuk melakukan penilaian kebutuhan, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu wakil kepala sekolah.

Penerapan kurikulum merdeka merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya dan merupakan kelanjutan dari kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 35, kompetensi lulusan adalah kualifikasi keterampilan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai standar nasional yang disepakati (Mulyasa, 2021).

Tema inti kurikulum 2013 difokuskan pada pengembangan individu Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan berempati melalui integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tema sentral kurikulum mandiri adalah "belajar mandiri", yang menekankan kebebasan dan fleksibilitas guru dan siswa dalam memilih materi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan lokal dan global. Kurikulum mandiri juga lebih menekankan pada

pengembangan karakter dan identitas siswa Pancasila melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Siswa Pancasila (P5).

Sudah sebelas kali perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 telah digantikan oleh kurikulum merdeka, Setiap kurikulum memuat perbandingan antara kurikulum lama dan kurikulum baru, yang terlihat jelas dari persiapan hingga pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kurikulum Indonesia mengalami pergeseran dari satu waktu ke waktu selanjutnya sejalan dengan kemajuan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang mengajar kelas 8 dan 9 sesuai kurikulum 2013 di SMPN 8 Percut Sei Tuan menyatakan bahwa perbedaan kedua kurikulum tersebut tidak signifikan. Hanya perbedaan metode mengajar dan proses pembelajaran guru kelas 7 dibandingkan kelas 8 dan 9. Guru yang menerapkan K13 tetap mampu mengajar dan beradaptasi dengan kelas 7 yang menganut kurikulum merdeka. Semua itu dapat diatasi melalui kerja sama tim dan komunikasi yang baik.

Perbedaan perilaku belajar kedua kurikulum tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran terdiferensiasi tidak diterapkan di K-13. Kedua kurikulum tersebut memiliki model pembelajaran yang serupa, seperti pembelajaran berbasis proyek atau masalah, pembelajaran berbasis penyelidikan, dan pembelajaran penemuan. Perbedaan yang signifikan antara kedua kurikulum tersebut tidak begitu kentara karena banyaknya kesamaan dalam model dan modul yang digunakan.

Menurut wakil kurikulum di SMPN 8 Percut Sei Tuan, gesekan dan perbedaan antara K-13 dan kurikulum merdeka adalah bahwa pelatihan untuk kurikulum merdeka masih terbatas. Program tersebut baik jika guru memahami cara menerapkannya. Namun pada kenyataannya, banyak guru yang harus belajar secara mandiri atau bahkan mengabaikan program tersebut karena kurangnya pengawasan. Lebih jauh, kurikulum merdeka lebih banyak menggunakan teknologi (TI). Jika guru memahami cara menerapkan kurikulum merdeka, proses pembelajaran secara alami akan menjadi lebih menyenangkan dan bervariasi, meskipun tidak jauh berbeda dari K13. Semua kurikulum pada dasarnya sama yang terpenting adalah bagaimana mengajarkan materi dengan baik.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Pemilihan model pengembangan kurikulum bergantung pada sistem pendidikan tertentu dan konsep yang digunakan. Ada banyak pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli untuk pengembangan kurikulum. Salah satu contohnya adalah model Tyler, salah satu model paling populer di bidang pengembangan kurikulum, yang berfokus pada fase perencanaan, seperti yang dijelaskan dalam bukunya "*Basic Principles of Curriculum and Instruction*" (Diah Lestari, 2023). Model pelaksanaan kurikulum mandiri bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan interaktif serta memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat.

Sekolah penggerak berperan sebagai akselerator dalam pelaksanaan visi pendidikan nasional. Prioritas utama adalah melaksanakan kurikulum merdeka dengan tujuan meningkatkan pembelajaran secara menyeluruh untuk mencapai profil siswa Pancasila. Salah satu gagasan pelaksanaan kurikulum merdeka adalah dengan memperkenalkan proses pembelajaran berbasis proyek atau project *based learning* (PjBL). Seperti halnya perubahan Firman Allah dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11 (Kemenag RI, 2017).

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗوَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚوَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka

> *mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."* (Q.S. 13:11).

Surat Ar-Ra'd ayat 11 mengingatkan kita bahwa setiap orang harus berperan aktif dan bertanggung jawab dalam proses perubahan untuk mencapai perbaikan yang diharapkan melalui kurikulum merdeka. Oleh karena itu, ayat ini mendorong semua pihak yang terlibat untuk bekerja keras mengubah keadaan pendidikan menjadi generasi yang lebih baik.

Tentu saja, berbagai inisiatif dan perubahan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Namun, berbagai inisiatif dan regulasi yang akan diterapkan di sekolah harus diperhatikan oleh para pihak yang terlibat, seperti guru dan tenaga kependidikan. Kenyataannya, regulasi yang sering berubah dan tidak diterapkan secara efektif dapat menyebabkan beban kerja tambahan yang berat bagi guru.

Strategi wakil kurikulum dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Melalui perencanaan yang baik, pengembangan staf, kolaborasi yang efektif, pengawasan yang baik, penggunaan teknologi, dan fleksibilitas dalam penerapan, wakil kepala sekolah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan kurikulum di sekolah. Hal ini tidak hanya memperbaiki mutu pendidikan, tetapi juga membantu siswa untuk lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan (Harris, Jones, & Crick, 2020).

Strategi yang diterapkan oleh wakil kepala kurikulum di SMPN 8 Percut Sei Tuan adalah memberikan arahan dan pemahaman kepada para guru agar lebih fokus pada para pelajar. Ini disebabkan oleh fakta bahwa saat kurikulum baru diperkenalkan, para guru lebih banyak mengikuti pelatihan dan mengabaikan kewajiban mereka untuk mengajar siswa. Akibatnya, banyak siswa yang dibiarkan tanpa bimbingan dan hanya bermain di kelas tanpa adanya guru yang mengawasi atau memberikan tugas. Penekanan yang selalu disampaikan kepada para guru adalah bahwa siswa adalah prioritas utama.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala kurikulum SMPN 8 Percut Sei Tuan, diketahui bahwa beliau baru mengikuti pelatihan sekali, yaitu mengenai pembuatan jadwal untuk kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum ini terdapat dua versi, yaitu sistem blok dan sistem reguler. Kegiatan P5 dalam sistem blok diadakan selama sebulan penuh dalam setahun, sementara sistem reguler dijadwalkan setiap minggu pada hari Sabtu. Di SMPN 8 Percut Sei Tuan, diterapkan sistem reguler yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Sabtu.

Berdasarkan keterangan dari salah satu guru penggerak angkatan 9, yang merupakan satu-satunya pengajar berbasiskan kurikulum merdeka di SMPN 8 Percut Sei Tuan dan mengajar di kelas 7, tugasnya adalah mendukung penerapan kurikulum merdeka. Karena penerapan kurikulum merdeka baru berlangsung selama dua tahun dan masih berada dalam tahap awal, maka metode pembelajaran yang diterapkan adalah berbasis proyek atau teknologi.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum merdeka ialah pelaksanaan P5, yang merupakan yang pertama kali. Karena beliau merupakan satu-satunya guru penggerak, ia merasakan kesulitan dalam memberikan pemahaman mengenai kurikulum merdeka kepada guru-guru lainnya. Tugasnya meliputi penyusunan tema yang akan dilaksanakan selama setahun, penentuan petugas pelaksana, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik.

Ada tim yang terlibat dalam proyek P5, dengan adanya koordinator dan ketua untuk setiap proyek yang SK-nya dikeluarkan oleh wakil kepala kurikulum dan telah disetujui oleh kepala sekolah. Para guru yang terlibat dalam kepanitian P5 juga mendapatkan sertifikasi. Kegiatan P5 dilakukan selama setahun dengan 4 tema atau proyek, di mana dalam satu

semester ada sebanyak dua kali pelaksanaan yang dilaksanakan dari pukul 8 sampai 11 pagi. Kegiatan ini dilakukan baik di dalam dan di luar ruangan, dan dalam pelaksanaannya juga ada *ice breaking* agar anak-anak lebih bersemangat. Berbagai proyek yang sudah dilakukan meliputi:

Tema 1 : Suara Demokrasi (Pemilihan Ketua OSIS)
Tema 2 : Pengelolaan Lahan Sekolah (Penanaman Sayuran)
Tema 3 : Pembuatan Sabun Cuci Piring
Tema 4 : Pola Hidup Sehat (Menghindari Narkoba)
Tema 5 : P5 – PPK (Pencegah Penanganan Tindak Kekerasan)

Hasil proyek ini dapat dijual di rumah dan sekolah. Untuk memastikan struktur dan akuntansi yang tepat, laporan keuangan akan disiapkan untuk setiap kelas, dengan setiap siswa di kelas bertanggung jawab atas penjualan dan mengurus hasil yang dicapai bersama. Menurut hasil wawancara dengan guru penggerak, meskipun menjadi satu-satunya guru penggerak yang mengarahkan sendiri merupakan tantangan karena harus mengumpulkan semua informasi sendiri, namun ada banyak pelatihan yang tersedia yang sangat membantu. Beberapa pelatihan diadakan pada tahun 2024, dua luring dan satu daring, serta dukungan melalui platform merdeka mengajar. Salah satu tantangan bagi guru yang lanjut usia adalah beradaptasi menggunakan teknologi. Namun, ada pelatihan yang berfokus pada pembelajaran yang didukung TI, yang telah menghasilkan respons positif dan menyenangkan, serta keinginan untuk melanjutkan pelatihan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Kurikulum merdeka ialah model pembelajaran yang baru diluncurkan di Indonesia pada tahun pelajaran 2022/2023. Dalam implementasi kurikulum ini, keberhasilan tergantung pada berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat, seperti adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai, kemampuan serta motivasi para guru, dan kepemimpinan dari kepala sekolah. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum merdeka, di antaranya adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, rendahnya kemampuan dan motivasi guru, serta kurangnya kolaborasi antara kepala madrasah dengan para guru (Sri Andriani, 2024).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pelaksanaan kurikulum merdeka belum berjalan lancar. Motivasi sebagian siswa masih rendah dan partisipasi dalam program belajar mandiri belum optimal. Sebagian siswa belum terbiasa dengan metode pembelajaran yang lebih mengutamakan kreativitas daripada pembelajaran yang hanya mengandalkan guru. Namun kendala tersebut tidak sampai mengganggu kegiatan yang telah direncanakan (Khotimah, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kurikulum di SMPN 8 Percut Sei Tuan terkait sarana dan prasarana, pihak sekolah telah menyiapkan segala sumber daya dan kebutuhan untuk P5 dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Anggaran telah disiapkan untuk segala kebutuhan guna pengajar dapat mengajar dengan tenang dan bisa melaksanakan proyek dengan efisien.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka adalah keterbatasan guru, yang mengharuskan sebagian guru untuk menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai guru kurikulum K-13 dan juga guru kurikulum merdeka. Hal ini menambah beban kerja guru karena laporan dari kedua kurikulum tersebut sangat berbeda. Di sisi lain, saat guru mengikuti pelatihan mengajar merdeka, mereka sering mengalami kurangnya pengawasan siswa dan kelas kosong. Sekolah ini hanya memiliki satu orang guru penggerak, dan jumlah tersebut tidak mungkin bertambah karena pemerintah berencana untuk mengeluarkan kurikulum baru. Oleh karena itu, semua guru harus mampu mengimbangi kekurangan tersebut dan menjalankan berbagai tugas.

Guru SMPN 8 Percut Sei Tuan menjelaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan kurikulum, selalu ada peluang untuk menyelesaikannya melalui kolaborasi yang positif dan komunikasi yang efisien. Kolaborasi yang baik menjadi kunci dalam penerapan P5, karena keberhasilan proyek yang dilaksanakan dapat menumbuhkan antusiasme dan keterlibatan di antara siswa. Di akhir setiap proyek, evaluasi dilakukan untuk mengatasi kekurangan dan memperkuat aspek positif. Sementara itu, kolaborasi antara koordinator kurikulum, administrasi sekolah, dan staf pengajar berjalan lancar, dan para guru melaporkan bahwa kepemimpinan koordinator kurikulum memberikan dukungan yang signifikan dalam penerapan kurikulum di sekolah.

Wakil kurikulum sendiri memperkirakan bahwa tantangan terbesar terletak pada penerapan kurikulum baru, karena ia memerlukan pembelajaran ulang, pelatihan, dan adaptasi dengan jadwal baru. Jika kurikulum yang ada tidak berubah, guru harus menerima dan menerapkan perubahan ini, karena ini adalah tanggung jawab mereka. Belum lagi pemerintah juga telah mengeluarkan program baru yang disebut "Kurikulum Tujuh Kebiasaan."

Para guru merasa bahwa seringnya perubahan kurikulum membuat mereka bingung mengenai proses pembelajaran. Ada materi pengajaran yang tumpang tindih di kelas yang berbeda, yang menerapkan kurikulum yang berbeda. Guru diharapkan untuk mahir dalam menggunakan alat dan referensi pendidikan. Karena itu, kerja sama tim dan berbagi pengetahuan antar guru sangat penting untuk membantu setiap guru memahami perbedaan kurikulum agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa posisi wakil kepala sekolah yang mengelola kurikulum memegang peranan penting dalam penerapan kurikulum merdeka di SMPN 8 Percut Sei Tuan, yaitu berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap kurikulum, menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan guru. Meskipun sekolah ini menerapkan dua kurikulum yang berbeda, namun kerja sama tim dan komunikasi yang efektif antar guru membuat semua berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti.

Keberhasilan penerapan kurikulum merdeka sangat didukung oleh fasilitas yang disediakan sekolah, pelatihan yang diikuti oleh guru, dan tentu saja bimbingan dan kepemimpinan proaktif yang diberikan oleh wakil kurikulum. Selain itu, perubahan kurikulum yang terus menerus sering kali menjadi tantangan bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Guru membutuhkan waktu untuk memahami, beradaptasi, dan menerapkannya, terutama di era teknologi yang terus berkembang, di mana guru harus siap menghadapi berbagai peluang yang muncul. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia diharapkan mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi berbagai tantangan global.

REFERENSI

DeMatthews, D. E. (2014). How to Improve Curriculum Leadership: Integrating Leadership Theory and Management Strategies. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, *87*(5), 192–196. doi: 10.1080/00098655.2014.911141.

Diah Lestari, D. (2023). Kurikulum Merdeka: Hakikat Kurikulum Dalam Pendidikan. *JISM: JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT*, *1*(2), 123–133. doi: 10.62214/jayu.v1i2.129.

Fakhri, A. (2023). Kurikulum Merdeka dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran : Menjawab Tantangan Sosial dalam Meningkatkan Keterampilan Abad 21. *C.E.S (Confrence Of Elementary Studies)*, *1*(1), 32–40.

Fatimatuzzohroq, D. (2022). Kebijakan Kepemimpinan Waka Kurikulum terhadap Kinerja

Guru Dalam Proses Pembelajaran. *El-Aulady Kajian Pendidikan Dasar Madrasah*, *1*, 10.

Gusti, Sri, D. (2020). Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi. In *Yayasan Kita Menulis* (Cet Pertam, Vol. 4). Medan: Yayasan Kita Menulis. Retrieved from http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150.

Harris, A., Jones, M., & Crick, T. (2020). Curriculum leadership: a critical contributor to school and system improvement. *School Leadership and Management*, *40*(1), 1–4. doi: 10.1080/13632434.2020.1704470.

Istiana, S. (2023). *Strategi Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kediri*. 168.

Kemenag RI. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. (2023). *Laporan Pemantauan Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun 2023* (1st ed.). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek.

Khotimah, D. (2024). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, *4*(1), 33–42. doi: 10.52620/jeis.v4i1.64

Mardianto. (2012). *Psikologi Pendidikan (Landasan Bagi Pengembangan Strategi Pembelajaran)* (Cetakan Pe). Medan: Perdana Publishing.

Mubarak, Z. (2022). *Desain Kurikulum Merdeka Era Revolusi 4.0*. Jakarta: Penyelaras Aksara.

Mulyasa. (2021). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka* (1st ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Permendikbud. (2021). Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. In *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* (Vol. 58).

Rizki Kurniati, dkk. (2024). Leadership of the Deputy Principal for Curriculum in Implementing the Independent Learning Policy At Smk Negeri 2 Depok Sleman District, Yogyakarta Special Region. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)*, *8*(1), 482–492. doi: 10.36526/js.v3i2.3427.

Sari, D. P., & Hendrayati, H. (2021). Kepemimpinan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dalam Pengelolaan Pembelajaran. Jurnal Administrasi Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *12*(3), 167–180.

Sri Andriani, D. (2024). Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka di MTs. Negeri 2 Medan. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, *2*(4), 382–396.